

# PERAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG DALAM PEMENANGAN CALON KEPALA DAERAH DI KABUPATEN MAGETAN

Noviano Suyide<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Magister Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Jl. Airlangga No.4 - 6, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60115  
E-mail: noviano.suyide@gmail.com

**Abstract**— *This research aims to analyze the role of supporting political parties in winning Regional Head Candidates in Magetan Regency. This research is normative research using conceptual studies (conceptual approach) and statutory studies (statute approach). The role of the supporting party in winning the regional head candidate in the 2018 - 2023 Magetan Regency Pilkada. Where the main function of a political party is to seek and maintain power in order to realize programs prepared based on a certain ideology. The method used by a political party in a democratic political system to gain and maintain power is to participate in general elections. Or in this context it is the regional elections which are held every 5 years in Magetan Regency. Based on the data obtained from this research, the role of political parties in Magetan Regency in the regional head election process can be explained as follows, namely: Candidate Selection Process, Registration of candidate pairs with the Magetan Regency KPUD, Campaign, Voting and vote counting.*

**Keywords**—: political parties, regional heads, Magetan district.

## I. PENDAHULUAN

Politik merupakan suatu usaha yang dilakukan secara bersama oleh rakyat demi terciptanya kebaikan bersama. Melakukan aktivitas politik berupa pemilihan pemimpin dan juga membuat aturan sesuai kebutuhan bersama melalui undang-undang yang ditetapkan adalah salah satu contohnya. Kedua, politik menyangkut segala penyelenggaraan pemerintah dan proses kenegaraan. Ketiga, politik sebagai jalan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan di dalam masyarakat (*power in the community*). Keempat, politik sebagai kegiatan dari segala bentuk perumusan yang berkaitan dengan kepentingan umum (*public interest*). Kelima, politik sebagai acuan yang digunakan untuk mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.<sup>1</sup> Komponen utama dalam sistem komunikasi politik menurut Gurevitch dan Blumler pertama, ditemukan pada lembaga-lembaga politik dalam aspek-aspek komunikasinya, kedua adalah institusi-institusi media dalam aspek-aspek politiknya, komponen yang ketiga, orientasi khalayak terhadap komunikasi politik, dan yang keempat adalah aspek-aspek budaya politik yang relevan dengan komunikasi.<sup>2</sup> Selain komunikasi politik, citra politik juga sangat dibutuhkan, Pembentukan citra positif seorang politisi membutuhkan waktu yang relatif lama untuk merancang pesan-pesan politik dan aktivitas politik yang disampaikan pada target audience.<sup>3</sup> Akan tetapi sering terdapat gejala bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi ini, sengaja atau tidak sengaja, menghasilkan informasi yang berat sebelah dan malahan menimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam masyarakat. Misinformasi semacam itu menghambat berkembangnya kehidupan politik yang sehat. , tidak dapat disangkal ada kalanya partai mengutamakan kepentingan partai atas kepentingan nasional. Loyalitas yang diajarkan adalah loyalitas kepada partai, yang melebihi loyalitas kepada negara. Dengan demikian ia mendidik pengikut-pengikutnya untuk melihat dirinya dalam konteks yang sangat sempit. Pemilihan kepala Daerah secara langsung selanjutnya diwujudkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang, Nomor 32 tahun 2004, Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut dilakukan oleh rakyat secara langsung, mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata tata caranya ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mempunyai sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu. Berdasarkan latarbelakang tersebut, bagaimana peran partai politik pengusung dalam kemenangan Calon Kepala Daerah di Kabupaten Magetan ?

<sup>1</sup>Putra, Dedi Kurnia Syah. (2012). *Media dan Politik; Menemukan Relasi Antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik*. Graha Ilmu: Yogyakarta, hal 37-38.

<sup>2</sup>Shahreza, Mirza. El-Yana, Korry. (2016). *Etika Komunikasi Politik*.Tangerang: Indigomedia.

<sup>3</sup>Firmanzah. (2007). *Marketing Politik: Antara Pemahan dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## II. TINJAUAN TEORITIS

Pilkada ialah suatu pemilihan kepala daerah yang secara langsung oleh warga di daerah setempat. Dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 ayat (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam ayat (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasal 57 (1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD. Carl J. Friedrich mendefinisikan Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiiil serta materiil.<sup>4</sup> Pengertian lain, Partai Politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.<sup>5</sup> Fungsi Partai Politik di Negara Demokrasi Pertama, sebagai sarana komunikasi politik yaitu di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Setelah itu partai politik merumuskan menjadi usulan kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukkan ke dalam program atau platform partai (*goal formulation*) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai perantara (*broker*) dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*). Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga negara masyarakat sebagai “*pengeras suara*”.

Komunikasi politik menurut Pippa Norris (2004) merupakan proses interaktif dimana proses transmisi informasi berlangsung antara para politisi, pemberitaan media dan publik. Proses ini berlangsung bersifat dari atas ke bawah antara institusi pemerintah kepada warga negara, secara horisontal berlangsung antara para aktor politik dan juga dari bawah ke atas melalui proses pembentukan opini publik yang digunakan untuk mempengaruhi pemegang kekuasaan<sup>6</sup>. McNair (2004) kemudian mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses komunikasi politik yang dilakukan secara sengaja yang terkait dengan politik. Di dalamnya mencakup tiga hal. Pertama, beragam bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politisi dan para aktor politik lainnya dengan tujuan tertentu. Kedua, komunikasi yang dijalankan oleh semua aktor termasuk oleh mereka yang bukan dalam kategori sebagai politisi seperti pemilih dan kolumnis media. Ketiga, proses dan aktivitas komunikasi yang berisi tentang aktor-aktor politik sebagaimana yang disampaikan dalam liputan pemberitaan media, editorial, dan beragam bentuk diskusi yang disajikan oleh media.<sup>7</sup>

Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkan dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.<sup>8</sup>

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan kajian konseptual (*conceptual approach*) dan kajian perundang-undangan (*statute approach*)<sup>9</sup>. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik studi literatur, yaitu teknik kajian dengan menganalisis berbagai referensi khususnya peran partai politik dalam kemenangan calon Kepala Daerah di Pilkada.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pemilu merupakan suatu metode politik atau cara warga negara memilih para wakil dan pemimpin mereka. Pada tingkat nasional maupun lokal tujuan dari pemilu adalah memilih kepala pemerintahan (eksekutif) dan memilih wakil-wakil rakyat dalam lembaga perwakilan rakyat (legislatif). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu, pada pasal 1 (1): dijelaskan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan pemilu dapat dilakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Sedangkan khusus untuk pemilihan kepala daerah

<sup>4</sup> Carl J Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Ed. ke-5. Weltham, (Mass.:Blaisdell Publishing Company, 1967), hal 419

<sup>5</sup> G.Sartori, *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1976), 63

<sup>6</sup> Pippa Norris. *Political Communications*. Encyclopedia of the Social Sciences. Pergamon/Elsevier Science. Tahun 2004. Lihat juga Norris, Pippa. "A Virtuous Circle? The Impact of Political Communications in Post-Industrial Democracies." *Challenges to Democracy*. Ed. Keith Dowding, James Hughes, and Helen Margetts. Palgrave Publishers, 2001, 100-117

<sup>7</sup> Brian McNair. 2004. *An Introduction to Political Communication*. London: Routledge. Third Edition. Hal 4.

<sup>8</sup> Sigmund Neumann. *Modern Political Parties*, "dalam *Comparative Politics: A Reader*, diedit oleh Harry Eckstein dan David E. Apter, (London: The Free Press of Glencoe, 1963), hal 352

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, "Hukum Dan Penelitian Hukum", Bandung, *Citra Aditya Bakti*.

(Pilkada) yang diselenggarakan secara langsung, memiliki dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, pasal 55 sampai dengan pasal 119, dan diperjelas dengan PP Nomor 6 tahun 2005 yaitu tentang petunjuk Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi dan/atau kabupaten kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah meliputi: (a) Pendaftaran Daftar Pemilih, (b) Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, (c) Kampanya, (d) Pemungutan Suara, (e) Penghitungan Suara, dan (f) Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah.<sup>10</sup> Demikian juga dengan keberadaan partai politik (papol) di Kabupaten Magetan, sebagai pilar bagi tegaknya sistem demokrasi partai politik juga memiliki peran dan andil yang cukup besar bagi pelaksanaan dan kelancaran proses pemilihan kepala daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut. Baik itu peran yang berbau sosialisasi. Pendidikan terhadap masyarakat, persaingan atau kompetisi dari para kader terbaiknya, hingga pada evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan. Semua itu tidak bisa dilepaskan dari potret partai politik di Kabupaten Magetan.

Fungsi Partai Politik di Negara Demokrasi Pertama, sebagai sarana komunikasi politik yaitu di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Seandainya tidak ada yang mengagregasi dan mengartikulasi, niscaya pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan, sedangkan dengan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpangsiuran dan benturan dikurangi. Agregasi dan artikulasi itulah salah satu fungsi komunikasi partai politik. Setelah itu partai politik merumuskan menjadi usulan kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukkan ke dalam program atau platform partai (*goal formulation*) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Demikianlah tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarkan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dalam pada itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Peran-peran sebagai jembatan sangat penting, karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat. Akan tetapi sering terdapat gejala bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi ini, sengaja atau tidak sengaja, menghasilkan informasi yang berat sebelah dan malahan menimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam masyarakat. Misinformasi semacam itu menghambat berkembangnya kehidupan politik yang sehat. Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik, dimana dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana dia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.

Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan "budaya politik" yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa. Definisi yang dirumuskan oleh seorang sosiologi politik yang bernama M. Rush (1992) menyebutkan bahwa Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikitnya banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik. "*Political socialization may be defined is the process by which individuals in a given society become acquainted with the political system and which to a certain degree determines their perceptions and their reactions to political phenomena*".<sup>11</sup>

Proses sosialisasi berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Ia berkembang melalui keluarga, sekolah, peer group, tempat kerja, pengalaman sebagai orang dewasa, organisasi keagamaan, dan partai politik. Ia juga menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain. Di sinilah letaknya partai dalam memainkan peran sebagai sarana sosialisasi politik. Pelaksanaan fungsi sosialisasinya dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dan sebagainya. Sisi lain dari fungsi sosialisai politik partai adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Karena itu partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin, dan partai berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya. Ada lagi yang lebih tinggi nilainya apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi yang satu ini, yakni mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional. Secara khusus perlu disebutkan di sini bahwa di negara-negara yang baru merdeka, partai-partai politik juga dituntut berperan memupuk identitas nasional dan integrasi nasional. Ini adalah tugas lain

<sup>10</sup> Pasal 65 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

<sup>11</sup> M. Rush, *Politics and Society: An Introduction to Political Sociology*, (Hemel Hempstead: Harvest Wheatsheep, 1992), hal 92

dalam kaitannya dengan sosialisasi politik. Namun, tidak dapat disangkal ada kalanya partai mengutamakan kepentingan partai atas kepentingan nasional. Loyalitas yang diajarkan adalah loyalitas kepada partai, yang melebihi loyalitas kepada negara. Dengan demikian ia mendidik pengikut-pengikutnya untuk melihat dirinya dalam konteks yang sangat sempit. Pandangan ini malahan dapat mengakibatkan pengotakan dan tidak membantu proses integrasi, yang bagi negara-negara berkembang menjadi begitu penting.

Ketiga, sebagai Sarana Rekrutmen Politik dimana fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa (sebagai *underbouw*) yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita, dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan keserasian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.

Keempat, sebagai Sarana Pengatur Konflik (Conflict Management) dimana potensi konflik selalu ada di dalam setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosial ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan itu menyimpan potensi konflik. Apalagi keanekaragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengandung konflik. Di sini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya. Pada tataran yang lain dapat dilihat pendapat dari pendapat yang lain, Arend Lijphart (1968). Menurut Lijphart, perbedaan-perbedaan atau perpecahan di tingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama di antara elite-elite politik. "*Segmented or subcultural cleavages at the mass level could be overcome by elite cooperation*".<sup>12</sup> Dalam konteks kepemimpinan, para pemimpin partai adalah elite politik.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahannya. Selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat. Partai juga merekrut orang-orang untuk diikutsertakan dalam kontes pemilihan wakil-wakil rakyat dan menemukan orang-orang yang cakap untuk menduduki posisi-posisi eksekutif. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik di negara demokrasi. Di pihak lain dapat dilihat bahwa sering kali partai malahan mempertajam pertentangan yang ada. Dan jika hal ini terjadi dalam suatu masyarakat yang rendah kadar konsensus nasionalnya, peran semacam ini dapat membahayakan stabilitas politik. Disisi lain fungsi Partai Politik di Negara Otoriter, bagaimana paham negara otoriter, misalnya bagaimana komunisme di Uni Soviet memandang partai politik. Pada kenyataannya pandangan tersebut memang berbeda. Menurut paham komunis, sifat dan tujuan partai politik bergantung pada situasi apakah partai komunis berkuasa di negara di mana ia berada atau tidak. Di negara di mana partai komunis tidak berkuasa, partai-partai politik lain dianggap sebagai mewakili kepentingan kelas tertentu yang tidak dapat bekerja untuk kepentingan umum. Dalam situasi seperti itu, partai komunis akan mempergunakan setiap kesempatan dan fasilitas yang tersedia (seperti yang terdapat di negara-negara demokrasi) untuk mencari dukungan seluas-luasnya, misalnya dengan jalan memupuk rasa tidak puas di kalangan rakyat.

Partai komunis bertujuan mencapai kedudukan kekuasaan yang dapat dijadikan batu loncatan guna menguasai semua partai politik yang ada dan menghancurkan sistem politik yang demokratis. Maka dari itu, partai ini menjadi paling efektif di negara yang pemerintahannya lemah dan yang rakyatnya kurang bersatu.<sup>13</sup> Akibat karakternya yang demikian, partai komunis sering dicurigai dan di beberapa negara bahkan dilarang. Akan tetapi tindakan semacam itu juga ada bahayanya. Sebab dalam keadaan seperti itu partai akan bergerak di bawah tanah, sehingga justru sukar di awasi. Apabila tidak menemukan jalan untuk merebut kekuasaan, partai akan mencoba mencapai tujuannya melalui kerja sama dengan partai-partai lain dengan mendirikan Front Rakyat atau Front Nasional (*popular front tactics*). Berbeda halnya apabila partai komunis berkuasa. Di sini partai komunis mempunyai kedudukan monopolistik, dan kebebasan bersaing ditiadakan. Dapat saja ia menentukan dirinya sebagai partai tunggal atau sekurang-kurangnya sebagai partai yang paling dominan, seperti yang terjadi di Uni Soviet, China, dan negara-negara komunis Eropa Timur. Partai Komunis juga melaksanakan beberapa fungsi, tetapi pelaksanaannya sangat berbeda dengan yang ada di negara-negara demokrasi. Misalnya, dalam rangka berfungsi sebagai sarana komunikasi politik Partai menyalurkan informasi untuk mengindoktrinasi masyarakat dengan informasi yang menunjang usaha pemimpin partai. Arus informasi lebih bersifat dari atas ke bawah, dari pada arus dua arah.

Fungsi sebagai sarana sosialisasi politik lebih ditekankan pada aspek pembinaan warga negara ke arah kehidupan dan cara berfikir yang sesuai dengan pola yang ditentukan oleh partai. Proses sosialisasi ini dilakukan secara ketat di sekolah,

<sup>12</sup> Arend Lijphart, 1995, *Electoral Systems and Party System*, ed. ke-2, (Oxford: Oxford University Press

<sup>13</sup> Gwendolen M. Carter dan John H. Herz, 1965, *Government and Politics in the Twentieth Century*, (New York: Friederick A. Praeger, 111

organisasi pemuda, tempat kerja seperti pabrik dan sebagainya, dan melalui dominasi Partai di hampir segala sektor kehidupan masyarakat. Sebaliknya, di negara-negara demokrasi partai berperan untuk menyelenggarakan integrasi warga negara ke dalam masyarakat umum. Partai juga berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik. Akan tetapi dalam hal ini ia mengutamakan orang yang mempunyai kemampuan untuk mengabdikan kepada Partai, yang menguasai ideologi Marxisme-Leninisme, dan yang kelak mampu menduduki kedudukan pimpinan untuk mengawasi kegiatan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu si calon anggota harus menjalani masa percobaan di mana ia harus memenuhi standar-standar ketat mengenai pengabdian dan kelakuan, baik pribadi maupun di muka umum, yang ditetapkan oleh Partai Komunis. Akan tetapi karena iklim politik tidak kompetitif maka pemilihan umum tidak merupakan sarana untuk memilih pimpinan negara, tetapi lebih bersifat sebagai tanda bukti dari loyalitas rakyat kepada negara dengan memilih calon yang ditentukan oleh Partai. Rezim ini dapat dikategorikan sebagai; “Sosialisme negara di mana kontrol politik ada di tangan Partai Komunis yang bersifat monopolistik dan hierarkis, dan di mana ekonomi diatur atas dasar kolektivitas dan perencanaan ekonomi terpusat dari negara.”<sup>14</sup>

Jadi, dari uraian tadi jelaslah kalau dikatakan bahwa fungsi partai politik di negara komunis berbeda sekali dengan partai dalam negara yang demokratis. Mengenai perbedaan ini Sigmund Neumann menjelaskannya sebagai berikut: Jika di negara demokrasi partai mengatur keinginan dan aspirasi golongan-golongan dalam masyarakat, maka partai komunis berfungsi untuk mengendalikan semua aspek kehidupan secara monopolistik. Jika dalam masyarakat demokratis partai berusaha menyelenggarakan integrasi warga negara ke dalam masyarakat umum, peran partai komunis ialah untuk memaksa individu agar menyesuaikan diri dengan suatu cara hidup yang sejalan dengan kepentingan partai (enforcement of conformity). Kedua fungsi ini diselenggarakan melalui propaganda dari atas ke bawah.<sup>15</sup> Dari berbagai pandangan dan fungsi tentang partai politik, penulis ingin mengaitkan dengan peran partai pengusung dalam kemenangan calon kepala daerah yang diusungnya khususnya pada Pilkada Kabupaten Magetan 2018 – 2023. Dimana fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Dengan cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum. Atau dalam konteks ini adalah pada pilkada yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali di Kabupaten Magetan. Untuk melihat berjalannya fungsi partai politik sebagai pelaksana sosialisasi politik, komunikasi politik, dan rekrutmen politik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini, peran partai politik di Kabupaten Magetan dalam proses pemilihan kepala daerah, dapat di jelaskan sebagai berikut, yaitu:

#### 1. Proses Penjaringan Bakal Calon

- Pada prinsipnya, proses penjaringan terdiri dari tiga tahap, yaitu: a. Tahap persiapan, sebagai pembentukan badan dan peraturan tentang tata cara dan persyaratan rekrutmen bakal calon. b. Tahap rekrutmen bagi masing-masing putra dan putri daerah yang akan maju sebagai calon kepala daerah. c. Tahap penetapan calon setelah melalui beberapa proses penyeleksian secara internal partai. d. Pengajuan dan penetapan kedalam SK kepada dewan pusat partai sebagai calon yang akan diusung dalam bursa Kabupaten Magetan.
2. Pendaftaran pasangan calon kepada KPUD Kabupaten Magetan. Pendaftaran ini dilakukan setelah masing-masing calon secara Internal partai mendapat dukungan dan penpakuan dari dewan pusat partai melalui SK Partai.
3. Kampanye. Kampanye merupakan sebuah bentuk upaya partai maupun KPUD untuk mensosialisasikan Pilkada, calon yang akan bersaing dan taat cara pencoblosan.
4. Pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini dilakukan setelah proses pencoblosan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung masing-masing yang mengajukan calon maupun calon yang ikut bersaing dalam pilkada mengajukan beberapa saksi sebagai saksi antara pemantau atas proses pemilihan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran partai pengusung dalam kemenangan calon kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Magetan 2018 – 2023. Dimana fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Dengan cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum. Atau dalam konteks ini adalah pada pilkada yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali di Kabupaten Magetan. Untuk melihat berjalannya fungsi partai politik sebagai pelaksana sosialisasi politik, komunikasi politik, dan rekrutmen politik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *“Hukum Dan Penelitian Hukum”*, Bandung, Citra Aditya Bakti.  
 Arend Lijphart. (1995). *Electoral Systems and Party System, ed.ke-2*, Oxford: Oxford University Press  
 Brian McNair. (2004). *An Introduction to Political Communication*. London: Routledge. Third Edition

<sup>14</sup> Heywood, 2000, *Key Concepts in Politics*, New York: Palgrave, hlm. 49.

<sup>15</sup>Sigmund Neumann. 1963, *Modern Political Parties*, “dalam Comparative Politics: A Reader, diedit oleh Harry Eckstein dan David E. Apter, London: The Free Press of Glencoe, hlm. 353.

- Carl J Friedrich. (1967). *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Ed.ke-5. Weltham, Mass.:Blaisdell Publishing Company
- Firmanzah.. (2007). *Marketing Politik: Antara Pemahan dan Realitas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- G.Sartori. (1976). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*, Cambridge: Cambridge University Press
- Gwendolen M. Carter dan John H. Herz. (1965). *Government and Politics in the Twentieth Century*, New York: Friederick A. Praeger
- Heywood. (2000). *Key Concepts in Politics*, New York: Palgrave
- M.Rush. (1992). *Politics and Society: An Introduction to Political Sociology*, Hemel Hempstead: Harvest Wheatsheap
- Putra, Dedi Kurnia Syah.. (2012). *Media dan Politik; Menemukan Relasi Antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Pippa Norris. (2001). *Political Communications. Encyclopedia of the Social Sciences. Pergamon/Elsevier Science*. Tahun 2004. Lihat juga Norris, Pippa. "A Virtuous Circle? The Impact of Political Communications in Post-Industrial Democracies." *Challenges to Democracy*. Ed. Keith Dowding, James Hughes, and Helen Margetts. Palgrave Publishers
- Shahreza, Mirza. El-Yana, Korry. (2016). *Etika Komunikasi Politik*.Tangerang: Indigomedia.
- Sigmund Neumann. (1963). *Modern Political Parties*, "dalam *Comparative Politics: A Reader*, diedit oleh Harry Eckstein dan David E. Apter, London: The Free Press of Glencoe

### ***Peraturan Perundang-undangan***

- Undang Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu
- Undang-Undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah